

TRANSMIGRASI KE PAPUA BARAT: PERNYATAAN IPWP



INTERNATIONAL PARLIAMENTARIANS
for WEST PAPUA (IPWP)

IPWP dengan keprihatinan mendalam mencatat pengumuman terbaru Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara bahwa Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subianto, berencana memperkenalkan program transmigrasi baru ke Papua Barat.

Transmigrasi telah menyebabkan perubahan demografi yang drastis di Papua Barat. Antara tahun 1972 hingga 2000, lebih dari 300.000 orang Indonesia dipindahkan ke Papua Barat, dan populasi non-pribumi di Papua Barat meningkat dari 6% menjadi 21%. Tujuan transmigrasi adalah untuk mengurangi jumlah penduduk asli Melanesia sambil mengamankan kendali atas sumber daya alam yang kaya di Papua Barat. Meskipun program transmigrasi resmi yang didukung negara ke Papua Barat berakhir pada tahun 2001, transmigrasi tidak resmi terus berlanjut. Akibatnya, sangat mungkin bahwa jumlah penduduk Indonesia sekarang melebihi jumlah penduduk asli Papua di Papua Barat.

Transmigrasi telah menghasilkan diskriminasi struktural dalam bidang pendidikan, hak atas tanah, dan pekerjaan. Tingkat ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara orang Papua dan orang Indonesia sangat tinggi, sementara migran mendominasi pasar tenaga kerja. Alih-alih mewujudkan kesetaraan kesejahteraan di seluruh Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Menteri Suryanagara, transmigrasi justru memastikan bahwa Papua Barat tetap menjadi provinsi termiskin di Indonesia.

Program transmigrasi berturut-turut juga berjalan seiring dengan meningkatnya militerisasi dan pengusiran paksa di Papua Barat. Pada tahun 1981, Indonesia meluncurkan Operasi Sapu Bersih yang bertujuan memaksa orang Papua Barat meninggalkan tanah mereka dan menggantinya dengan para transmigran. Diperkirakan antara 3.000 hingga 13.000 orang Papua Barat tewas selama operasi tersebut.

Hari ini, Papua Barat sedang mengalami krisis kemanusiaan baru. Menurut PBB, dari tahun 2018 hingga 2022, antara 60.000 hingga 100.000 orang Papua Barat telah mengungsi akibat militerisasi Indonesia. Per September 2024, pembela hak asasi manusia memperkirakan lebih dari 79.000 orang Papua masih mengungsi di dalam negeri dan tidak dapat kembali ke rumah mereka. Indonesia terus menolak memberikan akses ke Papua Barat bagi Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), meskipun lebih dari 100 negara anggota PBB telah meminta kunjungan PBB.

Pembaruan kebijakan negara mengenai transmigrasi ke Papua Barat dengan demikian mewakili ancaman serius terhadap hak atas tanah dan kelangsungan budaya Papua Barat. Dengan mempertimbangkan hal ini, kami sekali lagi mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengizinkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB masuk ke Papua Barat dan mendesak komunitas internasional untuk berbuat lebih banyak agar kunjungan ini dapat terwujud.

Alex Sobel, Anggota Parlemen, Inggris, Ketua IPWP

Carles Puigdemont, Anggota Parlemen Eropa, Catalonia (Negara Bagian Spanyol), Wakil Ketua IPWP

Gorka Elejabarrieta, Senator, Negara Basque (Negara Bagian Spanyol), Wakil Ketua IPWP

Matthew Wale, Anggota Parlemen, Pemimpin Oposisi, Kepulauan Solomon, Wakil Ketua IPWP

